

Pendidikan yang Terjajah

Pendidikan merupakan landasan vital pembentuk karakter bangsa. Dibutuhkan manusia yang 'sadar' akan haknya sebagai jiwa terdidik dengan moral serta perannya dalam kehidupan yang beradab. Hal tersebut yang kemudian mendorong terbentuknya elemen pendidikan secara formal oleh pemerintah. Namun, seperti apa karakter didik yang terbentuk, bila pendidikan sebagai tujuan mulia sudah diwarnai oleh 'kepentingan'

Lembaga pendidikan yang sering disebut sekolah, memang diharapkan mencetak manusia-manusia yang dapat berpikir, bermoral dan paham akan peran dan fungsinya sebagai manusia. Pendidikan membentuk manusia 'sadar' akan keberadaan dirinya, peka terhadap perubahan realitas sosial, serta dapat membangun lingkungan dengan pengetahuan yang dimiliki.

Dasar tujuan mulia itu pada kenyataannya kini telah berubah, manakala banyak kepentingan turut mewarnai dunia pendidikan kita (Indonesia). Elemen pendidikan pun pada akhirnya menunjukkan sikap pragmatismenya terhadap sistem yang dibuat oleh penguasa. Ironisnya, mereka yang mengenyam pendidikan selama ini tidak sadar bahwa haknya akan pendidikan telah dijajah dari berbagai segi.

Pendidikan yang Memerdekakan

Sebagaimana bangsa ini mendapatkan hak kemerdekaannya, karena mereka tahu dan paham apa arti kebebasan. Berawal dari kaum terpelajar yang ingin melepaskan bangsa ini dari rasa ketakutan. Takut menjadi bangsa yang terbelakang, takut menjadi bangsa yang dibodohi, takut tidak menjadi bangsa yang bermoral dan beradab. Itulah pemikiran pejuang kita seperti Hatta, Syahrir, Bung Tomo dan banyak tokoh berpendidikan lainnya yang juga ingin membebaskan bangsa ini dari rasa ketakutan itu.

Pendidikan itu memang proses pembentukan karakter manusia seperti yang diungkap Bung Hatta. Karakter seperti apa? tentu lah karakter seorang yang bermoral dan beradab sebagai manusia terdidik. Karakter yang siap menghadapi permasalahan pada masyarakat dan bangsanya. Dimana pemerintah sangat berperan dalam hal ini dengan berbagai kebijakan yang dibuat.

Pendidikan Murah

Impian pendidikan murah hanya sebatas harapan, menjadi nyata bagi masyarakat miskin. Bukan hal pesimis, akan tetapi merupakan fakta dimana pendidikan saat ini justru membentuk kelas sosial tersendiri pada masyarakat. Dimana tingginya biaya pendidikan hanya terjangkau bagi golongan menengah ke atas. Dengan fasilitas seadanya dan gedung sekolah yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Kembali rakyat kecil tetaplah rakyat kecil yang mendapatkan perhatian kecil juga dari penguasa.

Isu biaya pendidikan murah ternyata perannya hanya bersifat sementara di awal sedangkan bila menilik lebih jauh lagi banyak biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar. Terlebih adanya tuntutan sosial dengan adanya kondisi perekonomian yang membuat harga barang kebutuhan makin melambung agaknya kebijakan biaya pendidikan murah tidak memberikan pengaruh yang berarti. Seperti halnya pemberian BOS dalam kondisi kenaikan BBM.

Sedangkan sekolah elit dengan fasilitas lengkap dan guru pengajar yang dikatakan mahir hanya dapat diperoleh bagi mereka yang kaya. Dan mereka seolah dipisahkan dari realita bangsanya yakni bangsa yang membutuhkan rasa sosial tinggi terhadap sesama. Bukan budaya gonta ganti hp baru, meributkan pakaian apa yang harus dipakai hari ini dan lainnya. Sementara ditempat yang lain, makan tiga kali sehari dirasa masih susah.

Institusi Pendidikan Sebagai Komoditi Bisnis

Ada lagi pendidikan yang digunakan seperti ajang bisnis dengan sistem lelang. Bagi siapa yang mengeluarkan uang paling banyak memiliki peluang tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan di institusi pendidikan tertentu. Hal ini menjadi sangat tidak layak sekali dilakukan oleh sebuah bentukan institusi

pendidikan, apa lagi yang masih bertatus milik negara. Dimana seharusnya, semua orang berkesempatan untuk sekolah ditempat itu. Jadi bukan hanya orang yang memiliki tawaran terbanyak.

Contoh umum yang terjadi dalam dunia perguruan tinggi misalnya, terdapat beberapa jalur masuk yang ditawarkan untuk dapat menjadi seorang mahasiswa. Semakin jelas menggambarkan peluang yang mudah didapat bagi kaum bermodal. Sebagai alasan salah satu cara menunjang fasilitas pembangunan perguruan tinggi yaitu kerjasama orang tua mahasiswa dengan perguruan tinggi lebih terpusat pada bisnis.

Instanisasi Pendidikan

Masih juga dihadapkan oleh tujuan pendidikan yang kurang jelas. Pemahaman konsep pendidikan yang sempit, yaitu setelah SD (Sekolah Dasar) menuju SMP (Sekolah Menengah Pertama) kemudian SMA (Sekolah Menengah Atas) dan ilmu SMA hanya bisa digunakan untuk ke tingkatan Perguruan Tinggi (S1) dan seterusnya. Jadi, pendidikan yang diberikan hanya modal untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya.

Sifat pragmatis yang membudaya, seperti hafalan dari buku dan cara menghitung dengan tepat hanya bertujuan untuk dapat menyelesaikan soal ujian akhir agar lulus serta dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Tanpa pemahaman essensi dari proses pendidikan itu sendiri. Bahwa, untuk apa sesungguhnya mereka belajar, memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh tidak hanya tahu dan mengerti, arti dari predikat 'lulus' bagi kehidupan selanjutnya dalam masyarakat.

Hal ini menjadi wajar, saat pendidikan kini memang mencetak manusia-manusia yang dilepas untuk cepat bekerja kemudian menyandang 'sukses'. Bagaimana tidak, nilai sebuah ijazah sebagai surat berharga masih menjadi parameter utama cara menilai kualitas seseorang, padahal kualitas tidak dapat diukur hanya dari akumulasi angka. Contoh umum yang terjadi, untuk mendapatkan kenaikan pangkat di perusahaan negara, kita perlu mengantongi ijazah perguruan tinggi terlebih dahulu walaupun kita telah lama bekerja.

Fenomena arah dan tujuan pendidikan saat ini adalah kekhawatiran dan ketakutan tidak memperoleh pekerjaan tanpa mengikutsertakan 'ijazah'. Lulusan yang ditujukan bagi *stakeholder* (pengguna), namun siapakah sebenarnya *stakeholder* itu? Tidak lain adalah perusahaan yang mempekerjakan peserta didik. Jadi, peserta didik hanya dipersiapkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja seperti yang mereka inginkan. Ironisnya, konsep pendidikan yang ada semakin jauh meninggalkan fungsi dan perannya dalam membentuk manusia terdidik yang peka realitas

kehidupan sosial masyarakat. Cenderung membentuk mental individualis, yaitu bekerja dan sukses untuk diri sendiri serta menciptakan komunitas tertentu hingga semakin mempertegas jurang pemisah si kaya dan miskin.

Belum lagi kebijakan yang diterapkan mendorong terbentuknya sistem pendidikan praktis dan manfaatnya hanya sebatas temporal. Kurikulum yang sering berganti tanpa arah yang jelas, penghapusan maupun penggabungan materi ajar yang hanya mempertimbangkan efisiensi lulus tepat waktu bahkan demi sebuah proyek, akademisi mau membayar dengan iming-iming beasiswa yang dapat diperoleh bagi mereka yang mampu lulus dengan cepat dimana semua itu hanya memandang manusia sebagai produk instan yang harus mendatangkan keuntungan juga bernilai jual di pasar tenaga kerja.

Kapitalisme dalam Pendidikan

Keterpurukan pendidikan Indonesia ternyata sudah menjadi politik global. Sistem yang ada sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak. Kita lihat saja bagaimana para perguruan tinggi mulai berebut hibah kompetisi. Yang pada akhirnya berduyun-duyun menjadi BHP (Badan Hukum Pendidikan).

Pencabutan subsidi 20 % bagi pendidikan oleh pemerintah, terlepas dari alasan yang dikeluarkan yaitu pembersihan politik dari dunia kampus, ternyata dibalik itu terdapat peran World Bank sebagai penyelenggara. Sehingga mendorong para institusi perguruan tinggi BHP menuju sistem seleksi berbentuk '*capital trap*' (jaring kapitalisme, red). Dan pada akhirnya, perguruan tinggi yang secara otonomi memiliki independensi dana akhirnya memunculkan 2 pokok permasalahan, yaitu :

1. Lepas tangan pemerintah akan kewajibannya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ketika otonom, maka untuk keberlangsungan hidup perguruan tinggi akan bergantung pada kerja sama pihak asing maka akan lebih berorientasi pada penciptaan mahasiswa sebagai produk pendidikan sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Sehingga mahasiswa tak lebih dari obyek pasar kapitalisme global.

Seandainya seperti ini wajah pendidikan bangsa, maka bukan hanya busung lapar dan bencana alam yang melanda negeri ini. Akan tetapi bencana kebodohan, keterbelakangan dan keterjajahan akan menjadi kenyataan yang tinggal ditunggu wujudnya oleh generasi selanjutnya.

Endra, Seta
Disarikan dari diskusi Peringatan Hari Pendidikan
LPM CANOPY